



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat dan Daerah Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

2. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan daerah kabupaten/kota.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Menugaskan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan Tugas Pembantuan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 3

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Pasal 4

Program, kegiatan, dan dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Alokasi dan pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan melakukan:

- a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan; dan
- c. koordinasi pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dinas Kabupaten/Kota yang memperoleh Dana Tugas Pembantuan wajib membuat:

- a. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- c. surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan mengelola barang dan jasa yang dihibahkan dari hasil penyelenggaraan kegiatan tugas pembantuan.

Pasal 8

Bupati/wali kota dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan berpedoman pada Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Tugas Pembantuan yang merupakan penerimaan negara wajib disetor oleh kuasa pengguna anggaran ke rekening kas umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Tugas Pembantuan merupakan barang milik negara dan harus dilakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan melaksanakan fungsi terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan sebagai bahan Menteri dalam merumuskan kebijakan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 502

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2018

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.000)
PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA	Wirausaha melalui Tenaga Kerja Mandiri	67.815.000
	Padat Karya Infrastruktur	43.010.500
	Administrasi Kegiatan Tugas Pembantuan	8.837.930
	Total	119.663.430

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,

BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2018

ALOKASI DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

NO	KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI	PADAT KARYA	TENAGA KERJA MANDIRI	TOTAL PAGU
		8.837.930	43,010,500	67,815,000	119.663.430
		(Rp. 000)	(Rp. 000)	(Rp. 000)	(Rp. 000)
A	INDONESIA BAGIAN BARAT	4,659,060	17,712,000	36,135,000	58,506,060
1.	Kab. Kuningan	45,360	656,000	594,000	1,295,360
2.	Kab. Bandung Barat	41,510	328,000	594,000	963,510
3.	Kab. Garut	36,940	-	297,000	333,940
4.	Kab. Majalengka	52,970	656,000	594,000	1,302,970
5.	Kab. Tasikmalaya	36,940	164,000	297,000	497,940

6.	Kab. Sukabumi	43,570	164,000	297,000	504,570
7.	Kab. Purwakarta	52,970	656,000	594,000	1,302,970
8.	Kota Banjar	49,220	328,000	594,000	971,220
9.	Kab. Subang	48,820	328,000	594,000	970,820
10.	Kota Cirebon	48,820	164,000	594,000	806,820
11.	Kab. Pangandaran	45,590	-	594,000	639,590
12.	Kab. Demak	47,810	164,000	495,000	706,810
13.	Kab. Rembang	47,810	-	594,000	641,810
14.	Kab. Karanganyar	51,160	328,000	594,000	973,160
15.	Kab. Cilacap	45,810	164,000	495,000	704,810
16.	Kab. Kebumen	37,080	164,000	297,000	498,080
17.	Kab. Banyumas	43,910	-	297,000	340,910
18.	Kab. Klaten	51,160	492,000	297,000	840,160
19.	Kab. Kendal	47,810	-	495,000	542,810
20.	Kab. Jepara	47,810	-	594,000	641,810
21.	Kab. Semarang	47,810	-	495,000	542,810
22.	Kab. Wonogiri	45,910	-	297,000	342,910
23.	Kab. Boyolali	51,160	328,000	594,000	973,160

24.	Kab. Sragen	45,910	-	396,000	441,910
25.	Kab. Magelang	51,160	328,000	396,000	775,160
26.	Kab. Blora	51,160	328,000	396,000	775,160
27.	Kab. Gunung Kidul	51,110	164,000	594,000	809,110
28.	Kab. Bondowoso	56,660	656,000	594,000	1,306,660
29.	Kab. Sumenep	51,160	656,000	-	707,160
30.	Kota Batu	52,510	164,000	396,000	612,510
31.	Kab. Trenggalek	47,260	164,000	297,000	508,260
32.	Kab. Jombang	47,260	-	396,000	443,260
33.	Kab. Sidoarjo	52,510	164,000	495,000	711,510
34.	Kab. Probolinggo	52,510	164,000	495,000	711,510
35.	Kab. Malang	51,160	328,000	594,000	973,160
36.	Kab. Nganjuk	45,910	-	297,000	342,910
37.	Kab. Bireuen	61,950	164,000	396,000	621,950
38.	Kab. Pidie Jaya	63,400	164,000	396,000	623,400
39.	Kab. Singkil	58,150	-	297,000	355,150
40.	Kota Subulussalam	55,870	656,000	594,000	1,305,870
41.	Kab. Nias Barat	63,400	328,000	396,000	787,400
42.	Kab. Tapanuli Tengah	63,400	328,000	198,000	589,400
43.	Kab. Asahan	63,400	328,000	396,000	787,400

44.	Kab. Langkat	63,400	164,000	297,000	524,400
45.	Kab. Dairi	63,400	164,000	297,000	524,400
46.	Kota Sibolga	63,400	328,000	198,000	589,400
47.	Kota. Binjai	63,400	328,000	297,000	688,400
48.	Kab. Padang Lawas	58,150	-	396,000	454,150
49.	Kab. Padang Lawas Utara	58,150	-	396,000	454,150
50.	Kab. Labuhan Batu	58,150	-	396,000	454,150
51.	Kab. Labuhan Batu Selatan	60,050	-	495,000	555,050
52.	Kab. Toba Samosir	66,750	492,000	396,000	954,750
53.	Kab. Batu Bara	63,400	328,000	396,000	787,400
54.	Kota Tanjung Balai	58,150	-	297,000	355,150
55.	Kota Padang	58,150	-	396,000	454,150
56.	Kab. Solok Selatan	58,150	-	396,000	454,150
57.	Kab. Solok	58,150	-	396,000	454,150
58.	Kab. Tanah Datar	58,150	-	396,000	454,150
59.	Kota Jambi	55,870	656,000	495,000	1,206,870
60.	Kab. Musi Rawas	66,750	328,000	594,000	988,750

61.	Kab. Ogan Ilir	58,150	-	396,000	454,150
62.	Kab. Empat Lawang	63,400	164,000	396,000	623,400
63.	Kab. Musi Rawas Utara	63,400	164,000	396,000	623,400
64.	Kab. Oku Selatan	63,400	164,000	396,000	623,400
65.	Kab. Mesuji	66,750	328,000	594,000	988,750
66.	Kab. Pesisir Barat	59,420	984,000	594,000	1,637,420
67.	Kab. Bengkulu Tengah	66,750	328,000	594,000	988,750
68.	Kota Bengkulu	66,750	328,000	594,000	988,750
69.	Kab. Muko Muko	66,750	328,000	594,000	988,750
70.	Kab. Bengkulu Selatan	66,750	328,000	594,000	988,750
71.	Kab. Kaur	55,870	492,000	594,000	1,141,870
72.	Kab. Pelalawan	55,870	656,000	594,000	1,305,870
73.	Kab. Indragiri Hilir	43.910	-	297.000	340.910
74.	Kab. Indragiri Hulu	43.910	-	297.000	340.910
75.	Kab. Kuantan Singingi	43.910	-	297.000	340.910
76.	Kab. Lebak	58,150	-	297,000	355,150
77.	Kota Tangerang Selatan	58,150	-	297,000	355,150
78.	Kota Batam	58,150	-	396,000	454,150

79.	Kab. Bangka Tengah	58,150	-	297,000	355,150
80.	Kab. Belitung Timur	60,050	164,000	297,000	521,050
81.	Kab. Seruyan	58,150	-	297,000	355,150
82.	Kab. Kayong Utara	58,150	-	297,000	355,150
83.	Kab. Sambas	58,150	-	396,000	454,150
84.	Kab. Landak	58,150	-	297,000	355,150
85.	Kab. Kapuas Hulu	63,400	328,000	297,000	688,400
B	INDONESIA BAGIAN TENGAH	2,849,840	17,422,500	22,374,000	42,646,340
86.	Kab. Nunukan	63,400	345,000	198,000	606,400
87.	Kab. Paser	58,150	-	297,000	355,150
88.	Kab. Kepulauan Sangihe	58,150	-	198,000	256,150
89.	Kab. Minahasa Selatan	63,400	172,500	495,000	730,900
90.	Kab. Minahasa Tenggara	63,400	-	594,000	657,400
91.	Kab. Morowali Utara	55,870	517,500	594,000	1,167,370
92.	Kab. Tojo Una-Una	58,150	-	297,000	355,150
93.	Kab. Donggala	63,400	345,000	396,000	804,400
94.	Kab. Parigi Moutong	58,150	-	297,000	355,150
95.	Kab. Sidenreng Rappang	55,870	517,500	495,000	1,068,370

96.	Kab. Jeneponto	66,750	345,000	594,000	1,005,750
97.	Kab. Sinjai	63,400	345,000	396,000	804,400
98.	Kab. Takalar	55,870	690,000	594,000	1,339,870
99.	Kab. Wajo	55,870	517,500	495,000	1,068,370
100.	Kab. Luwu	63,400	345,000	396,000	804,400
101.	Kab. Bone	66,750	517,500	396,000	980,250
102.	Kab. Pangkajene Kepulauan	55,870	517,500	594,000	1,167,370
103.	Kab. Bantaeng	63,400	345,000	396,000	804,400
104.	Kab. Kepulauan Selayar	58,150	-	396,000	454,150
105.	Kab Soppeng	63,400	345,000	396,000	804,400
106.	Kab. Tana Toraja	63,400	345,000	396,000	804,400
107.	Kab. Enrekang	63,400	345,000	396,000	804,400
108.	Kab. Barru	63,400	345,000	396,000	804,400
109.	Kota Pare-Pare	63,400	-	594,000	657,400
110.	Kab. Buton Tengah	59,420	862,500	594,000	1,515,920
111.	Kab. Konawe	59,420	1,035,000	594,000	1,688,420
112.	Kab. Konawe Utara	66,750	345,000	594,000	1,005,750
113.	Kab. Konawe Selatan	66,750	345,000	594,000	1,005,750
114.	Kab. Muna	66,750	345,000	594,000	1,005,750

115.	Kab. Bombana	66,750	345,000	594,000	1,005,750
116.	Kab. Kolaka Utara	66,750	345,000	594,000	1,005,750
117.	Kab. Muna Barat	63,400	345,000	396,000	804,400
118.	Kab. Konawe Kepulauan	66,750	345,000	594,000	1,005,750
119.	Kab. Buton selatan	66,750	345,000	594,000	1,005,750
120.	Kab. Kolaka Timur	55,070	517,500	594,000	1,166,570
121.	Kab. Lombok Barat	55,870	690,000	594,000	1,339,870
122.	Kab. Lombok Timur	66,750	345,000	594,000	1,005,750
123.	Kab. Mamasa	55,870	690,000	594,000	1,339,870
124.	Kab. Majene	66,750	345,000	594,000	1,005,750
125.	Kab. Mamuju Tengah	63,400	345,000	396,000	804,400
126.	Kab. Mamuju Utara	63,400	345,000	396,000	804,400
127.	Kab. Mamuju	55,870	690,000	594,000	1,339,870
128.	Kab. Boalemo	63,400	345,000	396,000	804,400
129.	Kota Gorontalo	59,420	862,500	594,000	1,515,920
130.	Kab. Gorontalo Utara	63,400	345,000	396,000	804,400
131.	Kab. Klungkung	66,750	345,000	594,000	1,005,750
C	INDONESIA BAGIAN TIMUR	1,329,030	7,876,000	9,306,000	18,511,030
132.	Kab. Maluku Tengah	58,150	-	297,000	355,150

133.	Kab. Maluku Tenggara Barat	58,150	-	297,000	355,150
134.	Kab. Maluku Tenggara	58,150	-	297,000	355,150
135.	Kab. Buru	55,870	716,000	594,000	1,365,870
136.	Kota Tual	58,150	-	297,000	355,150
137.	Kab. Belu	58,150	-	297,000	355,150
138.	Kab. Kupang	58,150	-	297,000	355,150
139.	Kab. Timur Tengah Selatan	58,150	-	297,000	355,150
140.	Kab. Manggarai Barat	59,420	895,000	594,000	1,548,420
141.	Kab. Sikka	58,150	-	297,000	355,150
142.	Kab. Malaka	58,150	-	297,000	355,150
143.	Kab. Alor	58,150	-	297,000	355,150
144.	Kab. Timor Tengah Utara	58,150	-	297,000	355,150
145.	Kab. Nagekeo	66,750	358,000	594,000	1,018,750
146.	Kota Jayapura	59,420	537,000	495,000	1,091,420
147.	Kab. Halmahera Timur	63,420	895,000	594,000	1,552,420

148.	Kab. Morotai	63,420	716,000	396,000	1,175,420
149.	Kab. Halmahera Selatan	63,420	895,000	594,000	1,552,420
150.	Kab. Halmahera Tengah	63,420	716,000	594,000	1,373,420
151.	Kab. Halmahera Barat	63,420	716,000	594,000	1,373,420
152.	Kota Tidore Kepulauan	63,420	1,074,000	594,000	1,731,420
153.	Kab. Sorong	67,400	358,000	396,000	821,400
TOTAL		8.837.930	43,010,500	67,815,000	119.663.430

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001